

RESOLUSI KONFLIK RASIAL NIRKEKERASAN DALAM NOVEL PLAYING THE ENEMY

Shinta Fitria Utami
Universitas Gadjah Mada
email: shinta.fitria.u@mail.ugm.ac.id

Abstract

Conflict or dissension is a social interaction's form that arises from the society. It happens because of differences, competitive interaction, prejudice, hatred, and also revenge. There are three approaches in resolating conflict, a power based approach, a right based approach, and an interest based approach. This paper contains research on literary work, that assumed, portray the resolution of racial conflict in novel *Playing the Enemy* by using sociology of literature approach. The result of this research indicates that rasial conflict, that happened, are resolved using a non-violence power approach.

Key words: conflict resolution, non-violence, conflict, rasial, novel

Abstrak

*Konflik atau pertikaian adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang muncul dari sebuah masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan, interaksi persaingan, prasangka, rasa benci dan juga dendam. Ada tiga pendekatan dalam penyelesaian konflik, yaitu pendekatan berbasis kekuatan, pendekatan berbasis hak, dan pendekatan berbasis kepentingan. Tulisan ini berisi penelitian terhadap karya sastra yang memotret penyelesaian konflik rasial yang terjadi didalam novel *Invictus* dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik rasial yang terjadi diselesaikan dengan pendekatan kekuatan nirkekerasan.*

Kata kunci: resolusi konflik, nirkekerasan, konflik, rasial, novel

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk hidup berkoloni. Soekanto (1990: 27) berpendapat bahwa "Sem sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai naluri untuk hidup berkawan sehingga disebut *social animal*". Oleh sebab itu, terbentuklah masyarakat yang merupakan sebuah sistem yang mencakup berbagai komponen dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan di antara sesama manusia ini membentuk sebuah interaksi sosial.

Salah satu bentuk interaksi sosial yang muncul dalam sebuah masyarakat adalah pertikaian atau konflik. Konflik timbul karena adanya perbedaan pada masing-masing individu atau suatu kelompok tertentu. Selain perbedaan, konflik antar kelompok atau golongan seringkali karena adanya pola-pola interaksi persaingan, prasangka, rasa benci dan dendam, baik itu yang bersifat individual, politis, idiologis, yang berbeda satu dengan yang lainnya (Iskandar, 2006: 30). Soekanto (1990: 107-108) mengatakan bahwa ada empat hal yang menyebabkan terjadinya konflik, yaitu perbedaan pendirian atau perasaan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan sosial.

Untuk menyelesaikan sebuah konflik, terdapat tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekuatan, pendekatan berbasis hak, dan pendekatan berbasis kepentingan. Douglas E. Noll (1999:2) menyatakan bahwa "*Power, rights, and interest are ways of a looking at and resolving conflict. Whenever possible, seek interest resolution, then the right enforcement, if all else fails, used power based process*". Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis kekuatan merupakan proses yang semampunya mungkin dihindari. Samsu Rizal Panggabean (2014: 4) berpendapat bahwa:

"Pendekatan (power based) ini dianggap hanya mengakomodir dan memenangkan pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Penggunaan ancaman, intimidasi, protes, dan kekerasan fisik terhadap lawan adalah dari pendekatan ini. Upaya lain adalah dengan membuat keputusan secara sepihak, termasuk melalui pengambilan suara ketika hal itu mendatangkan kemenangan karena jumlah mayoritas. Dengan demikian, pendekatan ini mengabaikan hak dan kepentingan orang lain yang menjadi lawan atau musuh dengan tujuan mencapai keinginan dan kepentingan sendiri".

Pendapat ini dicontohkan dengan penyelesaian konflik SARA pada rezim Orde Baru yang dikenal otoriter. Untuk mengatasi konflik, pemerintah memberlakukan kebijakan berupa penindasan dan sensor yang ketat sehingga masyarakat harus tunduk dan patuh. Jika melanggar, maka akan diselesaikan dengan cara kekerasan dengan menurunkan aparat militer maupun aparat kepolisian.

Hal ini berbanding terbalik dengan upaya penyelesaian konflik rasial yang terjadi di Afrika Selatan. Pendekatan berbasis kekuatan yang diterapkan oleh pemerintahan Nelson Mandela dalam penyelesaian konflik tersebut dilakukan secara nirkekerasan. Saat kepemimpinannya itulah, ia banyak mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk mempersatukan ras kulit putih dan kulit hitam yang telah lama tepecah belah. Dengan kekuasaan sebagai pemimpin negara, ia menggagalkan persatuan dan perdamaian di Afrika Selatan dari berbagai sektor.

Upaya-upaya perdamaian berbasis pendekatan kekuatan nirkekerasan ini akan dilihat melalui karya sastra berupa novel yang berjudul *Playing The Enemy*. Karya sastra dipilih sebagai sumber data dalam tulisan ini karena karya sastra merupakan fenomena sosial dan cerminan masyarakat riil. Melalui karya sastra, manusia dapat mencurahkan segala problematika kehidupan dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat Swingewood (1972: 13) bahwa "*Literature is a direct reflection of various facets of social structure, family relationships, class conflict, and possibly divorce trend, and population composition*". Tidak hanya memaparkan problema kehidupan, sastra terkadang juga memaparkan solusi untuk menyelesaikan problema tersebut. Seperti halnya novel berjudul *Playing the Enemy* yang mengisahkan upaya-upaya perdamaian di Afrika Selatan.

Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan upaya-upaya perdamaian yang berlandaskan pendekatan *power based* nirkekerasan yang dilakukan oleh Nelson Mandela sebagai kepala negara yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, khususnya kasus Apartheid di Afrika Selatan, yang terefleksikan dalam novel tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian secara keseluruhan berdasarkan teori para ahli yang berkaitan dengan resolusi konflik dan sosiologi sastra. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa fenomena-fenomena karya sastra berupa kalimat

dan dialog yang mengandung unsur penyelesaian konflik rasial.

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam analisisnya. Tahapan-tahapan tersebut adalah pencarian data dan sumber kepustakaan terkait resolusi konflik, pembacaan berulang terhadap data penelitian, pengidentifikasian kalimat dan dialog yang mengandung fenomena resolusi konflik, serta menganalisis data-data yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Apartheid* dan Implikasinya

Konflik Rasial di Afrika Selatan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik *Apartheid*. *Apartheid* secara leksikal memiliki arti 'pemisahan'. Adapun dalam konteks sosial politik, *Apartheid* merupakan sebuah kebijakan atau aturan yang memisahkan hak-hak manusia menurut ras mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Clark (2013: 3) bahwa "*Apartheid, literary 'apartness' or 'separateness' in Afrikaans and Dutch languages, is the name was given to a policy of separating people by race, with regard to where they lived, where they went to school, where they worked, and where they died*". Dalam kasus Afrika selatan, pemisahan yang terjadi adalah pemisahan antara bangsa kulit putih dengan bangsa lainnya yang mendiami negara tersebut. Kebijakan *Apartheid* ini pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial Belanda di Afrika tepatnya di Cape (Tanjung Harapan) pada tahun 1652. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Poground (1993: 9) bahwasannya "*Apartheid* mulai berlangsung di Afrika Selatan jauh sebelum tahun 1948. Sejarahnya dimulai dari abad ke-17 ketika Belanda masih menjadi bangsa dagang yang kuat". Saat itu perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC, menguasai arus perdagangan di sekitar samudera Hindia.

Oleh karena terhalang jarak yang jauh dengan benua Eropa, Belanda membangun tempat persinggahan di Tanjung Harapan, sebuah daerah yang terletak di ujung selatan benua Afrika. Lambat laun, tempat singgah tersebut menjadi pemukiman tetap. Selain mereka, di sana terdapat bangsa kulit kuning yang terdiri dari suku Khoikhoi, San, dan Bushmen. Saat bidang pertanian dan peternakan berkembang, konflik mulai terjadi antara Belanda dan suku Khoikhoi karena perebutan wilayah merumput ternak mereka. Konflik ini semakin tajam hingga terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Belanda dan suku Khoikhoi. Belanda tidak hanya membantai orang-orang Khoikhoi, tetapi juga membantai dua suku lain. Dari sinilah terbentuklah pola sistem sosial Afrika Selatan, yaitu bangsa

kulit putih adalah majikan dan bangsa non-kulit putih adalah budak.

Pada tahun 1795, Inggris masuk dan menguasai wilayah Tanjung Harapan. Sama seperti halnya Belanda, Inggris datang dengan membawa pemukimnya juga. Hal ini menyebabkan adanya dua golongan bangsa kulit putih, yaitu bangsa kulit putih penutur bahasa Belanda dan bangsa kulit putih penutur bahasa Inggris. Pada tahun 1834, Inggris menghapuskan perbudakan. Kebijakan ini membuat pemukim Belanda meninggalkan Tanjung Harapan dan bermigrasi ke pedalaman Afrika Selatan. Di tempat baru tersebut, mereka menggarap lahan pertanian sehingga disebut dengan julukan 'Boer' (petani). Walaupun tidak memiliki budak, tetapi mereka mempekerjakan warga pribumi dengan upah yang minim. Tenaga kerja yang murah tersedia bagi orang Boer, yaitu orang Bantu yang berkulit coklat, yang bertemu dengan orang Boer ketika makin masuk ke daerah pedalaman (Poground, 1993: 12). Selain suku Bantu, di pedalaman tersebut juga terdapat bangsa kulit hitam yang terbagi dalam beberapa suku seperti suku Xhosa, Swazi, Pedi, dan Sotho.

Sekitar abad ke-19, terjadilah perang antar suku dari bangsa kulit hitam. Di saat yang sama, para pemukim Belanda dan Inggris mengambil kesempatan untuk mengadu domba antara suku-suku tersebut. Pada akhirnya koalisi ini dapat menguasai wilayah kediaman warga pribumi tersebut dan merebut hewan ternak mereka. Untuk bertahan hidup, mereka mencari pekerjaan di pertanian atau peternakan para pemukim Belanda maupun Inggris. Pada tahun 1866 dan 1886 ditemukanlah tambang intan dan tambang emas di wilayah tersebut. Orang-orang kulit hitam dipekerjakan sebagai pekerja kasar di pertambangan tersebut dengan upah yang juga minim. Penambangan ini semakin berkembang dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, Inggris menetapkan aturan 'Poll Tax'. Jika mereka tidak membayar pajak tersebut, maka mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Satu-satunya cara untuk membayar pajak, tentu saja dengan bekerja di pertambangan. Dari sini berbagai aturan mulai membatasi ruang gerak ras kulit hitam mulai dari segregasi tempat tinggal antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Ras kulit putih tinggal di kota-kota modern, sedangkan ras kulit hitam ditempatkan di daerah kumuh yang penuh sesak.

Pada tahun 1899, pecahlah perang antar-orang-orang Boer (pemukim Belanda) dan Inggris. Perang yang dikenal dengan Perang Boer ini terjadi akibat kekhawatiran orang-orang Boer terhadap kekuasaan Inggris di wilayah Afrika Selatan. Perang ini usah pada tahun 1902 melalui

sebuah perjanjian damai. Inggris juga mengusahan upaya persatuan antara dua ras kulit putih tersebut hingga berdirilah Union South Africa pada tanggal 31 Mei 1910. Akan tetapi, bangsa kulit hitam yang merupakan mayoritas tidak termasuk dalam persatuan ini. Mereka dianggap sebagai masyarakat kelas dua. Sama halnya dengan para tenaga kerja yang didatangkan dari Afrika Timur, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara.

Pada tahun 1912, didirikanlah South Africa Native National Congress yang diganti nama menjadi African National Congress (ANC). Mereka meminta kesamaan hak dan kesempatan, tetapi ditolak oleh Inggris. Aturan segregasi makin bertambah ketat. Selain harus menyerahkan tanah kepada bangsa kulit putih, mereka juga dibedakan dalam berbagai hal, mulai dari fasilitas umum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1930, istilah Apartheid mulai diimplementasikan pada ide pemisahan identitas warga negara Afrika penutur bahasa Eropa (ras kulit putih) dengan warga negara Afrika penutur bahasa Afrika (ras kulit hitam). Kemudian istilah Apartheid ini dikonotasikan oleh para politisi nasionalis Afrika sebagai produk imprealisme Inggris yang digunakan untuk menarik simpati politik, khususnya pada tahun 1948 pada saat kemenangan Herenigde Nationale Party. Hal ini serupa dengan pendapat Dubow (2014: 1) bahwasannya "*Apartheid was the electoral slogan which brought radical Afrikaner nationalism to power in South Africa in May 1948*".

Pemerintahan baru ini menetapkan Undang-undang Registrasi Penduduk berdasarkan ras. Akibat adanya asimilasi antar ras, banyak penduduk yang memiliki ras campuran. Hal ini mengakibatkan banyak keluarga terpisah antara ras kulit putih dan kulit berwarna. Apartheid juga dipraktekkan dengan cara pengadaaan Undang-undang Pas Jalan (surat izin) bagi ras kulit hitam yang membatasi ruang gerak mereka. Ditambah lagi dengan rambu-rambu di tempat umum yang bertulisan "Slegs Blankes" (hanya bagi kulit putih).

Seiring penindasan yang terus berlangsung, seiring itu pulalah perjuangan bangsa kulit hitam berlangsung. Khususnya perjuangan lewat ANC. Pada tahun 1949, organisasi ini sukses menggalang konferensi nasional menentang penguasa kulit putih. ANC bergerak lewat aksi protes terhadap Undang-undang rasial yang diterapkan pemerintah. Aksi ini dilakukan tanpa kekerasan. Sama dengan prinsip yang digalang Mahatma Gandhi. Akan tetapi, aksi yang berlandaskan nirkekerasan ini seringkali berakhir dengan kekerasan polisi Afrika Selatan yang notabene adalah ras kulit putih.

Tahun-tahun selanjutnya, polisi Afrika Selatan melakukan razia terhadap rumah atau kantor orang-orang kulit hitam, khususnya para aktivis ANC. Perlawanan terhadap Apartheid dianggap sebagai kejahatan berat. Aktivis-aktivis anti-Apartheid pun bergantian keluar masuk penjara, termasuk juga Nelson Mandela. Walaupun demikian, perjuangan ras kulit hitam tidak juga berhenti. Mereka tetap melakukan aksi protes hingga terjadi peristiwa besar seperti pembantaian Sharpeville dan demonstrasi di Langa.

Peristiwa ini diawali dengan aksi orang-orang kulit hitam yang memprotes kebijakan Pas Jalan pada tanggal 21 Maret 1960. Di wilayah tersebut, ANC mendapatkan dukungan yang besar dari orang-orang kulit hitam. Di tengah-tengah aksi, polisi Afrika Selatan menembakkan senjata kepada sekelompok orang tidak bersenjata yang mengakibatkan enam puluh sembilan orang menjadi korban. Penembakan ini menimbulkan amarah yang membuat massa turun ke jalan dan membakar Pas Jalan mereka. Hal ini membuat polisi Afrika Selatan balik mendatangi pemukiman ras kulit hitam dan menganiaya mereka sehingga korban luka-luka makin bertambah. Adapun demonstrasi di Langa dan Nyanga pada tanggal 21 April merupakan momentum dari berita pembantaian Sharpeville (Dubow, 2014: 77). Kerusuhan ini berlangsung selama sepuluh hari. Orang-orang kulit hitam turun ke jalan. Mereka melempar batu dan mengancam akan membunuh orang-orang kulit putih sehingga mengakibatkan beberapa pengunjung rasa ditembak mati. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Afrika Selatan sehingga timbullah prasangka buruk di antara kedua belah pihak. Bangsa kulit hitam menganggap bahwa bangsa kulit putih adalah penjajah yang sering menyakiti mereka. Sebaliknya, bangsa kulit putih menganggap bangsa kulit hitam adalah teroris yang mengancam kehidupan mereka.

B. Upaya Perdamaian di Afrika Selatan

Walaupun Apartheid telah dihapuskan dari sistem pemerintahan Afrika Selatan, tetapi tetap meninggalkan pengaruh kepada warga masyarakat negara tersebut. Di satu sisi, sebagian warga negara bersuka cita menyambut kebebasan ini, sedangkan di sisi lain, sebagian warga merasa terancam keberadaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sonneborn (2010: 95) bahwa "*To most South African the end of Apartheid promised the beginning of the brighter future for their nation. Yet, at the same time, many people also feared that the ghost of the past threatened any effort to move forward*".

Untuk mengatasi ketakutan tersebut, Mandela mengupayakan perdamaian di bawah

kepemimpinannya. Ia memulai dari formasi kabinet yang dibentuknya. Ia adalah sosok yang demokratis sehingga selalu mendengar berbagai macam pendapat dan memutuskannya. Oleh karena itu Mandela menganggap pentingnya keberadaan sudut pandang yang bermacam-macam dalam kabinetnya (Crompton, 2007: 87). Oleh karena itu, ia tidak membedakan staf kabinetnya menurut ras mereka. Ia lebih memilih merangkul semua ras yang ada di Afrika Selatan, termasuk kelompok minoritas seperti India.

Mandela juga mendirikan komisi TRC (Truth and Reconciliation Commission) yang berfokus pada penyelesaian masalah kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 1960-1994. Dari investigasi yang dilakukan, komite ini menemukan 22.000 kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi. Pengaduan para korban dibahas dalam persidangan yang disiarkan juga melalui stasiun televisi dan radio. Selain itu, para TRC memberi amnesti kepada pelaku kekerasan, yang kebanyakan adalah polisi dan tentara, dengan pertimbangan kejujuran kesaksian mereka. Selain program tersebut, Mandela juga mendirikan Reconstruction and Development Program (RDP). Komite ini berfokus pada masalah pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan masalah sengketa tanah yang kerap terjadi pada masa Apartheid.

Dari sektor ekonomi, pemerintahan Nelson Mandela mendirikan Growth, Employment, and Redistribution (GEAR). Program ini membantu meningkatkan kualitas ketrampilan tenaga kerja agar mendapatkan upah yang besar dan juga dan juga menarik perusahaan asing untuk menanamkan modal di Afrika Selatan. Di sini ia merangkul juga warga negara Afrika Selatan dari bangsa kulit putih yang memang berpengalaman dalam sektor perdagangan. Dalam upaya perdamaianya, ia juga mengangkat isu dari bidang olah raga, yaitu Rugby. Bagi bangsa kulit putih, Rugby merupakan olah raga yang populer, sedangkan bagi bangsa kulit hitam olah raga ini merupakan simbol kekerasan Apartheid. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Crompton (2007: 87) bahwa *“Afrikaners loved rugby. And Many black South Africa had negative view of the sport because during the days of Apartheid, expressions that linked rugby to police brutality had abounded”*.

C. Resolusi Konflik dalam Novel “Playing the Enemy”

1. Menyatukan dua lagu kebangsaan dan mengganti warna bendera Afrika Selatan

Pada masa awal pemerintahan Nelson Mandela terjadi kebijakan penggantian lagu kebangsaan Afrika Selatan yang berjudul Die Stem. Pihak ANC, sebagai partai yang mengukung

Mandela menjadi presiden, mendesak dirinya untuk mengganti lagu tersebut dengan lagu Nkosi Sikele. Hal ini dikarena lagu Nkosi Sikele lebih menggambarkan jiwa penderitaan orang-orang yang merindukan kebebasan dan dikarenakan lagu Die Stem, yang berbahasa Afrikaner, menyinggung simbol keberhasilan menghancurkan perlawanan bangsa kulit hitam. Hal ini seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini:

“The old anthem was clearly unacceptable. A part of “Die Stem” a somber martial tune, was an acceptably neutral entreaty to God to guard our beloved land; but another part of it and this was the part black people herad celebrated the triumphs of Retief, Pretorius, and the rest of the trekker as they drove upward through South Africa in the nineteenth century, crushing black resistance. The unofficial anthem of black South Africa “Nkosi Sikelele” was the richy soulful expression of a long suffering people yearning to be free” (Carlin, 2009: 93).

Dalam masalah ini, Mandela mengusulkan untuk menggunakan dua lagu kebangsaan tersebut secara bergantian dalam setiap acara kenegaraan termasuk dalam pembukaan pertandingan Rugby. Hal ini seperti dalam kutipan berikut:

“Mandela proposed instead that South Africa should have two anthems, to be played one immediately after the other at all official ceremonies, from presidential inaugurations to international Rugby matches” (Carlin, 2009: 93).

Setelah kebijakan ini dijalankan, akhirnya lagu Nkosi Sikelele resmi menjadi lagu kebangsaan Afrika Selatan dengan membagi liriknya dalam empat bahasa, yaitu bahasa suku Xhosa, suku Zulu, suku Seshoto, bahasa Afrikaner, dan juga bahasa Inggris.

Hal kedua yang ia lakukan adalah mengganti warna bendera Afrika Selatan yang semula hanya melambangkan orang-orang Afrikaner, Inggris dan Belanda, dengan warna bendera Afrika Selatan baru yang multiwarna sebagai lambang bahwa negara tersebut terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kutipan berikut:

“The two national anthems were played side by side as the brand new national flag fluttered. It was the most multicolored flag in the world, a sort of crazy quilt in black, green, gold, red, blue, and white, combining colors associated

16 Resolusi Konflik Rasial ...

with black resistance with those of the old South African Flag” (Carlin, 2009: 96).

2. Memilih Anggota Parlemen Nasional dari beragam Ras

Jika sebelum kebijakan Apartheid dihapuskan anggota parlemen harus dari ras kulit putih, maka Mandela memilih anggota parlemennya dari beragam ras. Ia tidak hanya merangkul pejabat parlemen dari ras kulit putih dan kulit hitam saja, tetapi juga merangkul mereka yang jauh lebih minoritas seperti bangsa India. Hal ini seperti kutipan berikut:

“On the May morning when the same chamber opened its door to Mandela’s non-racial democracy, the scene underwent a Technicolor transformation.... A glance at the roster of new members of parliament told it all. Before called Bhota or Van der Merwe or Smith. Now they was called those names, but also Bengu and Dlamini and Farisani and Maharaj and Mushwana and Neerahoo and Pahat and Zulu” (Carlin, 2009: 98).

Tidak hanya merangkul berbagai ras, tetapi ia juga memasukkan orang-orang yang pernah bertikai sebelumnya dalam konflik rasial di negara tersebut, yaitu anggota ANC yang banyak ditahan dan kelompok polisi yang melakukan penahanan. Saat itu, orang-orang yang terlibat konflik tersebut ‘dipaksa’ bersatu untuk membangun Afrika Selatan yang baru. Hal ini sebagaimana kutipan berikut:

“More striking was the proportion of MP’s who had spent time in prison, or had been on the run of the police. Practically every ANC MP had broken the law; now they would be making it, led by the longest serving prisoner of them all, the last man in today, Mandela” (Carlin, 2009: 98).

3. Memilih PPU dirinya dari Dua Pihak

Pada awal masa jabatannya, Mandela memilih anggota PPU dari kedua belah pihak, dari pihak orang-orang kulit hitam yang berafiliasi dengan Umkhonto we Sizwe dan pihak orang-orang kulit putih yang berafiliasi dengan aparat kepolisian Afrika Selatan. Umkhonto we Sizwe sendiri adalah bagian dari ANC yang bersifat militer dan bertugas untuk mengawal aksi protes terhadap pemerintahan Afrika Selatan. Adapun pihak kepolisian Afrika Selatan adalah musuh bagi para anggota Umkhonto we Sizwe karena sering melakukan penyerangan dengan kekerasan bahkan

menahan warga negara Afrika Selatan yang berkulit hitam. Hal ini sebagaimana kutipan berikut:

“The PPU was united in its sense of mission but split down the middle between blacks and whites, between former members of Umkhonto we Sizwe, like Moonsamy, and former members of the security police. “The Umkhonto guys and the police guys: people who’d been each other’s mortal enemies, literary we had wanted to kill each other for years,” Moonsamy said, “though they succeeded, it’s sould be said, than more we did” (Carlin, 200: 116-117).

Hal ini dilakukan untuk membuat kedua belah pihak berinteraksi. Walaupun tidak mudah, tetapi interaksi ini kelak menciptakan dialog antara kedua belah pihak. Dari dialog-dialog yang terjadi, kedua belah pihak dapat mengetahui apa yang terjadi dan apa yang mereka rasakan serta inginkan untuk kehidupan ke depan. Dialog inilah yang mengantarkan pada penyelesaian konflik nirkekerasan dalam konflik rasial di Afrika Selatan.

4. Menjadikan Rugby sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Bagi bangsa kulit hitam di Afrika Selatan, olah raga Rugby merupakan simbol kekerasan Apartheid. Akan tetapi, di bawah kekuasaannya, Mandela ingin menjadikan Rugby sebagai alat untuk mempersatukan beragam ras yang terdapat di negaranya. Ia berpendapat bahwa olah raga merupakan suatu alasan yang memiliki pengaruh besar untuk menyatukan sebuah bangsa. Hal ini sesuai dengan pidatonya saat memberikan penghargaan kepada Pele, seorang pesepak bola asal Brasil, *“Sport has the power to chance the world. It has the power to inspire, the power to unite people that little else has.... It is more powerful than government in breaking down racial barriers”* (Carlin, 2009: 20). Oleh karena itu salah satu agenda yang dirancangnya adalah Rugby World Cup yang akan diadakan di Afrika Selatan sebagai usaha untuk menyatukan orang-orang Afrika Selatan. Hal ini sebagaimana kutipan berikut:

“For what Mandela had reckoned, in the half instinctive, half calculating way of his, was that World Cup prove helpful in the great challenge of national unification that still lay ahead” (Carlin, 2009: 102).

Pada awalnya, kebijakan ini ditentang oleh kedua belah pihak. Louis Luyt, seorang kulit putih yang memangku otoritas tim Rugby Afrika Selatan, mencemooh usulan penggunaan bendera dan lagu

kebangsaan baru yang ditetapkan oleh menteri olah raga. Dengan kelihaihan Mandela dalam berkomunikasi dan sikap menghargai bangsa kulit putih, Luyt menyetujui rencana tersebut. Luyt mengangkat Edward Griffiths, CEO fedarsi Rugby Afrika Selatan, dan Morne du Pelsis, mantan kepen tim Rugby Afrika Selatan, sebagai manajer tim Piala Dunia Rugby. Griffiths kemudian membantu perjuangan Mandela mempersatukan bangsa dengan menasionalisasikan Rugby lewat kampanye “One team, one country”. Hal ini seperti kutipan berikut:

“Griffiths earned praise for the deftness with which he ran the World Cup operation, but his most enduring and valuable contribution came in the form of the slogan he invented for the Springbok campaign. “One Team, One Country” not only captured the imagination of South Africans, it conveyed Mandela’s purpose to perfection” (Carlin, 2009: 107).

5. Memberi Semangat dan Pujian terhadap Tim Springboks

Jika sebelumnya Mandela menasionalisasikan olah raga Rugby kepada orang-orang kulit hitam, maka selanjutnya ia memberikan semangat, pujian, dan ucapan terima kasih kepada Tim Springboks. Dengan bahasa yang lugas dan tidak mengancam, ia meyakinkan bahwa ANC, sebagai lambang perlawanan orang-orang kulit hitam, bukanlah merupakan momok yang menakutkan. Mandela juga berusaha mengambil hati para pemain dengan mengenal nama mereka satu persatu dan mengajak berbincang secara personal. Hal ini membuat para pemain merasa dihargai dan diterima keberadaan mereka sebagai warga negara Afrika Selatan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kutipan berikut:

“He than pointed out that a year after the elections, his government had remained true to its word. As Afrikaners, they had nothing to fear from the ANC. Nor, Mandela added, breaking into a grin, from their opponents the next day” (Carlin, 2009: 117).

“You now have the opportunity of serving South Africa and uniting our people. From the point of view of merit, you are equal to anything in the world. But we are playing at home and you have got an edges. Just remember, all of us, black and white, are behind you” (Carlin 2009:117).

6. Mengajak Warga Negara Kulit Putih untuk Berempati Terhadap Warga negara Kulit Hitam

Di sela-sela persiapan Piala Dunia Rugby, Mandela memerintahkan Tim Rugby, yang mewakili orang-orang kulit putih untuk menyebrang ke Robben Island. Robben Island sendiri merupakan penjara bagi orang-orang kulit hitam dan juga kulit berwarna. Di sana mereka mengunjungi sel Mandela dan juga lapangan dimana Sang Presiden pernah dipekerjakan paksa sebagai pemecah batu. Hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:

“Robben Island was still being used as prison and prisoner there were either Black and Coloured. Part of the day’s event involved meeting them, but first the players took turn viewing the cell where Mandela had spent eighteen of his twenty seven years in captivity. The players entered the cell one or two at a time; it couldn’t hold anymore than that.... After Mandela’s cell, the Springbok players went outside to the yard where Mandela had once been obliged to break stones. Waiting for them was a group of prisoners” (Carlin, 2009: 118).

Hal ini berhasil menarik empati para pemain Springbok. Mereka dapat merasakan penderitaan orang-orang non-kulit putih akibat Apartheid dan juga mendapat semangat baru sebagai bagian dari Afrika Selatan walau saat itu berada di bawah pemerintahan Nelson Mandela yang berkulit hitam. Hal ini sebagaimana kutipan di bawah ini:

“Small remembered the episode. “The prisoners not only sang for us, they gave us a huge cheer and I... I just burst into tears,” he said, his eyes reddening again at the recollection. “That was where the sense really took hold in me that I belonged to the new South Africa, and where I really got a sense of the responsibility of my position as a Springbok. There I was, hearing the applause for me, and at the same time thinking about Mandela’s cell and how he spent twenty-seven years in prison and came out with love and friendship. All that washed over me, that huge realization, and the tears just rolled down my face” (Carlin, 2009: 118).

7. Melepaskan Simbol Kekerasan Apartheid dari Rugby

Selain berkunjung ke Robben Island, para pemain *Springboks* diminta untuk datang ke daerah padat di pinggiran kota untuk melatih anak-anak kulit hitam bermain Rugby. Hal ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk mencari dukungan terhadap *Springboks*, tetapi juga melepaskan Rugby dari simbol kekerasan Apartheid dan eksklusifitas orang-orang kulit putih. Adapun bagi pemain *Springboks*, kunjungan ini menambah empati mereka bagi orang-orang kulit hitam yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini sebagaimana kutipan berikut:

“Some three hundred children gathered around a dusty field for a coaching clinic led by Morné du Plessis, who divided the boys up into groups of fifteen, but it was Mark Andrews who attracted all the attention: because he was so huge, and because he also happened to speak Xhosa. Balie Swart was there too, leading the children in passing routines, cheerfully revealing to their flabbergasted elders that big Boers could be friends too. That same evening Du Plessis took a group of players to a rickety stadium where local black teams played. There was a game on and Du Plessis felt it would be appreciated if the Springboks came along to watch. It was, thanks not least to James Small, whose blend of talent and notoriety made him the most recognizable face in the party. Small spent an hour and a half signing autographs, for adults and children alike” (Carlin, 2009: 120).

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa kedua belah pihak dapat menyadari perbedaan yang menjadi konflik berkepanjangan di Afrika Selatan. Pemain Rugby yang mayoritas orang-orang kulit putih tidak lagi merasa inferior saat berinteraksi dengan orang-orang kulit hitam yang hidup di daerah kumuh. Begitu juga orang-orang kulit hitam. Mereka tidak lagi memandang orang-orang kulit putih sebagai musuh yang harus mereka musnahkan.

KESIMPULAN

Resolusi konflik yang digalang oleh Nelson Mandela dapat dikategorikan sebagai resolusi berbasis pendekatan kekuatan karena pada mulanya tidak ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk berdamai. Hal yang menarik adalah aplikasi resolusi berbasis kekuatan yang dijalankan secara nirkekerasan. Kedua belah pihak ‘dipaksa’ untuk saling bekerjasama dan saling mendukung satu dengan yang lain. Secara tidak langsung hal ini menciptakan rasa empati dan

menghilangkan kebencian serta prasangka buruk di antara pihak-pihak yang bertikai tersebut. Hal ini seperti pesan yang ditulis Mandela; If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner. Address their heart, don’t address their brain. Jika kalian ingin berdamai dengan musuh kalian, kalian harus bekerjasama dengan musuh kalian. Kelak, mereka akan menjadi rekan kalian. Tujulah hati mereka, bukan otak mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Zainal Abidin Bagir, Ph.D selaku dosen pengampu mata kuliah Dialog Antar Agama yang memberikan kebebasan untuk mengembangkan materi resolusi konflik ke dalam ranah kajian sastra.

DAFTAR PUSTAKA

- Carlin, John. 2009. *Playing The Enemy*. United States of America: The Penguin Press.
- Clark, Nancy L. dan William H. Worger. 2013. *South Africa The Rise and Fall of Apartheid*. United States of America: Routledge.
- Crompton, Samuel Willard. 2007. *Modern Peacemaker Nelson Mandela: Ending Apartheid in South Africa*. United States: Chelsea House Publisher.
- Dubow, Saul. 2014. *Apartheid, 1948-1994*. England: Oxford University Press.
- Iskandar, Syaifuddin. 2006. *Konflik Etnik dalam Masyarakat Majemuk*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Noll, Douglas. E. 1999. *Power, Rights, and Interests*. Peacemaking.
- Panggabean, Samsu Rizal dkk. 2014. *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Pendekatan Advokasi*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies.
- Poground, Benjamin. 1993. *Nelson Mandela: Pemimpin Afrika Selatan yang Dipenjara Selama Dua Puluh Tujuh Tahun Karena Berjuang Menentang Apartheid (Diterjemahkan oleh Hilmar Farid dari buku berjudul Nelson Mandela)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sonnerborn, Liz. 2010. *The End of Apartheid in South Africa*. United States: Chelsea House Publisher.
- Swingewood, Alan dan Diana Laurenson. 1972. *Sociology of Literature*. England: Paladin.

